

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Media massa selalu menjadi sorotan dari berbagai kalangan masyarakat dan merupakan lahan yang menguntungkan terutama di negara-negara maju dan negara yang menganut sistem demokrasi. Sering kali media massa berada dalam kekuasaan pemerintah untuk dijadikan sebagai alat perjuangan partai dalam mencapai tujuan ideologi. Dalam kegiatan politik, fungsi media massa (media elektronik maupun cetak) biasanya digunakan sebagai sumber informasi, fungsi partisipasi, fungsi sosialisasi dan pendidikan politik, fungsi mengembangkan budaya politik, serta fungsi integrasi bangsa (Harun & Sumarno, 2006, hlm. 140).

Melihat kepada fungsi sebagai sumber informasi dan partisipasi dalam politik, media massa terlihat sebagai unsur yang penting dalam kehidupan bernegara. Fungsi media massa yang *pertama* yaitu sebagai sumber informasi yang menyajikan, menayangkan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di berbagai dunia termasuk aktivitas aktor-aktor politik dengan sikap dan perilaku politik yang melekat pada para aktor tersebut. *Kedua*, sebagai fungsi partisipasi menunjukkan bahwa setiap unsur berita harus mampu membangkitkan kesetaraan di dalam mendukung segala kebijaksanaan pemerintah selama kebijakan tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, media massa mempunyai peran dalam kehidupan bernegara salah satunya dalam bidang politik.

Perkembangan politik di Indonesia tidak luput dari pemberitaan di berbagai media massa yang menjadi konsumsi publik, begitu pun keadaan politik di Indonesia antara tahun 1968-1974. Pada tahun tersebut, Indonesia berada pada masa kekuasaan pemerintahan Soeharto. Dalam pemberitaan yang dimuat dalam berbagai media massa tentunya melibatkan pihak-pihak kompeten dalam bidangnya. Pemberitaan yang mereka berikan tidak terlepas dari sudut pandang pribadi dalam menanggapi suatu peristiwa yang terjadi. Pasallo (2013, hlm. 91) menyebutkan bahwa media massa merupakan sarana penyebar informasi

**Rurry Rafa'nilla, 2019**

**PANDANGAN MOCHTAR LUBIS DALAM SURAT KABAR INDONESIA RAYA  
TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK DI INDONESIA TAHUN 1968-1974**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kepada masyarakat. Oleh karena itu, media massa memiliki peranan penting dalam penyebaran informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dalam masalah politik dan kehidupan bernegara, biasanya pemikiran-pemikiran pemerintah tidak secara utuh dapat sampai kepada masyarakat. Maka dari itu, media massa juga mempunyai tugas untuk menjembatani antara pemikiran pemerintah (kebijakan, desisi, program)

**Rurry Rafa'nilla, 2019**

***PANDANGAN MOCHTAR LUBIS DALAM SURAT KABAR INDONESIA RAYA  
TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK DI INDONESIA TAHUN 1968-1974***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan pemikiran politik masyarakat, biasanya dalam bentuk tuntutan, harapan, ketidakpuasaan, saran atau pendapat.

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru media massa menjadi sesuatu hal yang penting, seperti yang diungkapkan oleh Wahyuni (2000, hlm 199-200) bahwa cara pandang komunikasi politik Orde Baru dapat dikatakan sangat identik dengan konsep politik Louis Althusser dari kubu Marxist. Kelompok ini merumuskan komunikasi politik sebagai penggunaan perlengkapan, alat-alat, ataupun perangkat komunikasi (*communication apparatus*) untuk menjamin legitimasi kekuasaan. Jadi hal ini tidak salah disebutkan bahwa media massa juga dapat dijadikan sebagai alat untuk melenggangkan kejayaan suatu pemerintahan.

Pada masa Orde Baru, banyak sekali tokoh pers yang berperan dan mengambil bagian sebagai pemeran dalam sejarah, salah satunya adalah Mochtar Lubis yang merupakan salah satu tokoh penting yang mewarnai perkembangan pers di Indonesia yang lahir di Sumatera Barat pada tanggal 7 Maret 1922, anak keenam dari Mara Husein Lubis dan istrinya Siti Madinah Nasution (Hill, 2011, hlm. 19). Ia merupakan wartawan yang memberitakan dalam berbagai bidang kehidupan salah satunya adalah pemberitaan mengenai situasi politik Indonesia. Pekerjaan sebagai seorang wartawan, mendorong Mochtar Lubis menjadi pengamat situasi politik Indonesia. Tulisannya sering kali mewarnai perkembangan politik Indonesia dengan berbagai kritikan-kritikan yang cenderung sangat terbuka terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan pandangannya, seperti yang diungkapkan Mochtar Lubis ketika menjadi narasumber dalam salah satu surat kabar ibu kota. “Apabila saya melihat orang lain didera dengan berbagai cara. Saya serasa akan mengamuk kalau melihat orang disakiti di depan mata saya” (Hadimadja, 1995, hlm.116). Dalam kutipan tersebut jelas bahwa seorang Mochtar Lubis sering kali bertindak dan berontak ketika melihat orang yang dirampas hak nya dalam hidup. Implikasi dari sikap tersebut terlihat pada tulisan-tulisannya yang cenderung keras dalam mengkritik suatu ketidakadilan dan kerugian yang terjadi di masyarakat.

Salah satu media cetak yang memuat tulisan Mochtar Lubis adalah surat kabar *Indonesia Raya* yang dapat dilihat dibagian tajuk-tajuk dalam surat kabar tersebut. Sejalan dengan hal tersebut Atmakusumah (1997, hlm. xiv) mengungkapkan bahwa biasanya dalam tajuk-tajuk rencana yang ditulis Mochtar Lubis mencantumkan namanya sendiri untuk mempermudah pelacakan dan merupakan sebuah tanda bahwa apa yang terdapat dalam tajuk-tajuk tersebut adalah pendapat pribadinya. Tulisan-tulisannya lebih banyak menyinggung masalah

pemerintahan dan segala sesuatu mengenai permasalahan nasional yang terjadi, dalam segi sosial, politik, maupun dalam segi ekonomi.

Surat kabar *Indonesia Raya* pernah dilarang terbit pada masa pemerintahan Soekarno akibat dari tulisan-tulisan Mochtar Lubis yang bersinggungan dan bertolak belakang dengan pemerintah. Selain dilarang terbitnya surat kabar *Indonesia Raya*, juga dilakukan penahanan terhadap Mochtar Lubis yang terhitung hampir sembilan tahun lamanya dan baru dibebaskan pada tahun 1966. Pada tanggal 27 Juni 1966, Mochtar bebas dari penjara dan kemudian memunculkan keinginan untuk mendirikan pers kembali terutama surat kabar *Indonesia Raya* dengan sifat pers yang bebas, berani, kuat, dan harus membantu membentuk tradisi-tradisi untuk kehidupan demokrasi, hormat pada hukum, disiplin dan bertanggung jawab sosial, hormat pada hak asasi dan kemerdekaan manusia (Hill, 2011, hlm. 114-115). Harapan yang diinginkan oleh Mochtar Lubis untuk surat kabar *Indonesia Raya* adalah demi membangun citra pers Indonesia yang baik dan juga demi membangun jati diri manusia Indonesia kearah yang lebih baik melalui cara menyuguhi masyarakat dengan bacaan kearah pemikiran yang lebih terbuka.

Pada masa pemerintahan Soekarno, dapat disebut sebagai masa suram seorang Mochtar Lubis yang harus melalui hari-harinya di penjara selama kurang lebih sembilan tahun akibat dari pandangan yang bertolak belakang dengan visi dari pemerintahan Soekarno. Bahkan, kesakitan dari berbagai pengalamannya ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul *Catatan Subversif* karya Mochtar Lubis yang diterbitkan pada tahun 1980. Dalam hal ini kita dapat melihat sedikitnya sifat dari seorang Mochtar Lubis yang kritis dalam memandang suatu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan yang berdiri.

Perjalanan politik Indonesia mengalami pasang surut, setelah pemerintahan Soekarno runtuh pada Maret 1968 MPRS secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia (Hadi & Kasuma, 2012, hlm. 41). Ketetapan MPRS XI tahun 1966 yang mengamanatkan agar pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah pada Sidang Istimewa MPRS 1967, oleh Presiden Soeharto dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971. Rosihan Anwar (1992, hlm. 52) yang menyebutkan bahwa setelah lebih dari satu tahun membicarakannya, akhirnya DPR-GR menyelesaikan Undang-Undang Pemilihan Umum yang baru. Pada tanggal 27 November parlemen menerima dengan formal undang-undang itu. karena sangat lambat jalannya, pemilihan tidak akan dapat berlangsung lebih cepat dari pada pertengahan tahun 1969, mengingat

persiapan-persiapan teknik, barangkali bahkan dalam tahun 1970, sedangkan mulanya dimaksud menyelenggarakan pemilihan umum pada bulan Juli 1968.

Diangkatnya Soeharto menjadi presiden Indonesia atas presiden sebelumnya yaitu Soekarno melalui proses yang cukup panjang. Peristiwa-peristiwa yang terjadi menjadikan keadaan Indonesia berada dalam kekacauan di berbagai aspek. Sampai beberapa bulan setelah usaha kudeta 1965, masa depan politik Indonesia masih belum jelas. Pada akhirnya, Soeharto membangun pemerintahan baru yang dikenal dengan “Orde Baru” Indonesia untuk membedakannya dengan “Orde Lama” dari masa pemerintahan Soekarno.

Menurut Hadi & Kasuma (2012, hlm. 40) dalam jurnal *Verlenden* menyebutkan bahwa periode atau kurun waktu 1966-1980 bisa dikatakan sebagai tahapan dari era konsolidasi Orde Baru dan Soeharto. Sebagai upaya untuk menggantikan posisi Soekarno, kemunculan dari Soeharto menjadi aktor yang cukup berperan dalam perubahan tatanan politik pasca peristiwa 1965. Soeharto muncul sebagai sosok yang dianggap menjadi sinar baru bagi negeri ini. Salah satu kesalahan dari Soekarno adalah tidak terlalu melihat Soeharto sebagai orang yang dapat menggantikan posisinya sebagai presiden. Seperti yang disebutkan dalam Ricklefs (2008, hlm. 594) bahwa Soekarno tampak tidak terlalu serius melihat Soeharto sebagai pesaingnya. Selama beberapa bulan setelah adanya Supersemar 1966, Sukarno berusaha membuktikan bahwa usaha kudeta hanya merupakan insiden kecil dalam proses revolusi yang masih bergulir dan bahwa dia tetap masih berkuasa. Tetapi Soeharto membuktikan dirinya sebagai lawan dan mampu mengalahkan Soekarno dalam persaingan untuk memperebutkan kedudukan sebagai presiden Indonesia.

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mampu berkuasa selama 32 tahun di Republik Indonesia. Melalui proses yang panjang, pemerintahan Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional pasca peristiwa 1965. Kehidupan bernegara berlangsung dibawah pemerintahan yang baru dengan segala upaya dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan untuk membawa negara kearah yang lebih baik salah satunya dalam masalah politik. Seperti halnya yang ditegaskan oleh Ali Moertopo, bahwa stabilitas politik dan keamanan nasional merupakan syarat utama bagi kelangsungan pembangunan (Moertopo, 1983, hlm. 26-28).

Kebijakan politik yang dilakukan pemerintah sering kali menjadi sorotan dalam suatu kehidupan bernegara. Hal tersebut dikarenakan

suatu kebijakan politik dalam suatu negara akan dapat membawa perubahan dan menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi. Kebijakan politik ini juga tidak terlepas dari sorotan media massa yang berfungsi sebagai jembatan penyampai informasi pemikiran pemerintah kepada masyarakat. Sering kali media massa menyampaikan informasi yang saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya baik itu pro terhadap kebijakan politik pemerintahan maupun kontra terhadap kebijakan politik pemerintahan. Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah terjadi tergantung siapa orang yang menulisnya.

Berbagai kebijakan politik dilakukan oleh pemerintahan pada masa awal orde baru yaitu dalam kurun waktu 1968-1974 baik itu kebijakan politik dalam negeri maupun kebijakan politik luar negeri Indonesia. Kebijakan yang dilakukan tentunya merupakan suatu upaya untuk kepentingan Indonesia, meskipun dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri terdapat banyak kepentingan beberapa kalangan untuk mendapatkan kepentingan tersendiri. Serta, dalam melaksanakan suatu kebijakan akan menimbulkan banyak pandangan baik itu pro maupun kontra dari berbagai kalangan. Dalam Lubis (1978, hlm. 25) disebutkan bahwa manusia Indonesia memiliki tradisi protes dan perlawanan terhadap apa saja yang mereka rasakan tidak adil. Namun hal ini jelas bahwa setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Pandangan yang dilontarkan oleh seseorang bisa jadi dilatar belakangi oleh asal orang tersebut, misalnya dari pers, mahasiswa, militer, aktivis, ataupun seorang politikus.

Mochtar Lubis dikatakan sebagai anti-Soekarno dan anti-Komunis dan dapat dikatakan pendukung dari pemerintahan Soeharto. Bahkan dalam Hill (2011, hlm. 113), Mochtar Lubis disebutkan sebagai 'Anak Emas Orde Baru'. Setelah dilarang terbitnya surat kabar *Indonesia Raya* pada masa Orde Lama kemudian ada usaha dari Mochtar Lubis untuk kembali menerbitkan surat kabar tersebut dari tahun 1966, akhirnya Mochtar Lubis mendapatkan surat kabar *Indonesia Raya* kembali pada tahun 1968. Surat kabar *Indonesia Raya*, kembali mewarnai masyarakat Indonesia sebagai bahan bacaannya setiap hari pada masa pemerintahan Soeharto. Dukungannya terhadap pemerintahan Soeharto juga diperjelas oleh kedekatan seorang Mochtar Lubis dengan pihak militer. Hal ini juga dilihat dari sikap menerima yang diberikan oleh Mochtar Lubis terhadap saran-saran dari sebuah seminar Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung pada bulan Agustus 1966 untuk membangun Orde Baru dan menghapus Orde Lama secara menyeluruh. Mochtar Lubis mendukung untuk mengakhiri dualisme dalam kepemimpinan di Indonesia (Hill, 2011, hlm. 116-117).

Pengalamannya dalam bidang pers telah membawa Mochtar Lubis melakukan perjuangan dalam melawan suatu tindakan yang tidak sepaham dengan pandangannya. Pemikiran-pemikirannya terus ia tuangkan melalui tulisan-tulisannya yang menjadi konsumsi publik pada saat itu melalui surat kabar *Indonesia Raya*. Sikap dukungannya terhadap pemerintahan Soeharto tidak berlangsung selamanya. Perlu diingat bahwa Mochtar Lubis adalah sosok yang tidak segan mengungkapkan pendapatnya ketika suatu kebijakan tidak sejalan dengan pandangannya. Hal ini terjadi pada tahun 1974, surat kabar *Indonesia Raya* kembali dilarang terbit akibat singgungan yang dilakukan oleh Mochtar Lubis terhadap pemerintahan.

Larangan terhadap pers mulai kembali terjadi pada tanggal 16 Januari 1974 ketika surat izin cetak *Nusantara* dicabut Kopkamtibda Jakarta. Setelah *Suluh Berita* di Surabaya tiga hari kemudian, berikutnya adalah *Mahasiswa Indonesia* yang dilarang pada tanggal 20 Januari 1974. Dalam satu gerak sapu terhadap koran-koran kritis pada tanggal 21 Januari 1974 Kopkamtibda Jakarta mencabut surat izin cetak *Indonesia Raya*, *Harian KAMI*, *Abadi*, *The Jakarta Time*, dan mingguan *Wenang* kemudian *Pemuda Indonesia*, *Pedomon*, dan mingguan *Ekspres* pada 24 Januari. Secara menyeluruh, 12 terbitan ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan dengan akibat 417 pekerja pers di Jakarta dan 85 orang di tempat lain kehilangan nafkah (Hill, 2011, hlm. 146).

Hal ini menjadikan menarik bagi penulis untuk dikaji lebih mendalam. Mochtar Lubis yang dikenal sebagai pendukung dari Soeharto namun juga merupakan orang yang tidak segan untuk mengeluarkan pendapatnya kembali di tahanan dalam penjara pada tahun 1975. Hal ini berarti ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde baru yang tidak sejalan dengan pemikiran dari seorang Mochtar Lubis. Hal yang membuat peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan kajian ini adalah dimulai dari ketertarikan peneliti terhadap tokoh Mochtar Lubis yang dikenal dengan keberaniannya dalam mengungkapkan pendapat terutama masalah penerapan kebijakan politik di Indonesia. Selain itu, melihat kepada perkembangan penulisan sejarah pada masa kini, peneliti jarang menemukan penulisan sejarah dalam sudut pandang tokoh yang berasal dari pers terutama pada masa orde baru yang sejauh ini peneliti berpandangan bawa masa Orde Baru adalah masa dimana di batasnya hak kebebasan dalam berpendapat. Kemudian, Peneliti juga memiliki keinginan untuk melengkapi penelitian terdahulu mengenai pembahasan yang terkait dengan tokoh Mochtar Lubis.

Kedudukan skripsi yang penulis ajukan adalah untuk melengkapi tulisan-tulisan yang terkait mengenai perpolitikan Indonesia pada tahun 1968-1974 dalam kaca mata seorang Mochtar Lubis yang berlatar belakang dari kalangan pers. Dengan demikian, peneliti mengajukan skripsi dengan judul **“Pandangan Mochtar Lubis dalam Surat Kabar *Indonesia Raya* terhadap Kebijakan Politik di Indonesia Tahun 1968-1974”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah utama yang akan dibahas adalah **Bagaimana pelaksanaan politik Indonesia antara tahun 1968-1974 dalam pandangan Mochtar Lubis melalui surat kabar *Indonesia Raya*?**. Untuk memfokuskan kajian penelitian, terdapat beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana keadaan politik di Indonesia pada tahun 1968-1974?
2. Bagaimana pandangan Mochtar Lubis terhadap kebijakan politik dalam negeri Indonesia pada tahun 1968-1974?
3. Bagaimana pandangan Mochtar Lubis terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia pada tahun 1968-1974?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan politik Indonesia tahun 1968-1974 dalam pandangan Mochtar Lubis. Selain itu, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis keadaan politik di Indonesia pada tahun 1968-1974.
2. Mengidentifikasi pandangan Mochtar Lubis terhadap orientasi kebijakan politik dalam negeri Indonesia pada tahun 1968-1974.
3. Mengidentifikasi pandangan Mochtar Lubis terhadap orientasi kebijakan politik luar negeri Indonesia pada tahun 1968-1974.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini secara umum adalah menambah pengetahuan mengenai pandangan Mochtar Lubis terhadap orientasi perpolitikan Indonesia pada tahun 1968-1974. Sedangkan khusus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian ini menambah khazanah pengetahuan dan penulisan mengenai sejarah nasional dengan melihat dari sudut pandangan seorang tokoh pers. Selain itu,



menjadi salah satu materi anjar bagi guru dalam pembelajaran sejarah yang tidak hanya melihat pada satu sudut pandang saja tetapi dapat lebih.

2. Bagi masyarakat yang memiliki minat terhadap sejarah terutama sejarah politik, diharapkan skripsi ini bisa menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat terutama dapat memberikan warna dan padangan baru mengenai kehidupan politik di Indonesia dalam periode tertentu khususnya selama tahun 1968-1974.
3. Manfaat nyata dari penulisan skripsi ini, diharapkan dapat menjadi bacaan umum mengenai gambaran sudut pandangan tokoh pers Indonesia yang memandang tinjau pandang yang berbeda terhadap politik di Indonesia. Dengan demikian akan menambah wawasan serta khazanah pengetahuan kita akan Indonesia.

### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Agar penelitian skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah yang merupakan alasan peneliti mengambil tema ini beserta dengan rumusan masalah sehingga penelitian ini terfokus pada satu masalah dikaji peneliti. Selain itu, terdapat tujuan penulisan yang ingin disampaikan peneliti dalam penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab ini peneliti membahas mengenai literatur yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji mengenai “Pandangan Mochtar Lubis dalam Surat Kabar Indonesia Raya terhadap Kebijakan Politik di Indonesia Tahun 1968-1974”. Literatur yang digunakan, berkaitan dengan kedua tokoh tersebut serta periode yang digunakan peneliti yaitu pada tahun 1968-1974. Selain itu, pada bab ini juga dibahas mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini yang berkaitan dengan tokoh yang memiliki pandangan politik maka konsep-konsep yang digunakan seperti politik dan media massa, kebebasan pers, dan kebijakan politik.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini membahas mengenai metode dan teknik penelitian, termasuk dalam bagaimana mencari berbagai sumber yang sesuai dengan topik penelitian hingga mengolah sumber-sumber yang diperoleh. Selain itu peneliti mengungkapkan langkah-langkah penelitian sejarah yang terdiri dari beberapa tahap yaitu heuristik atau mengumpulkan sumber, kritik terhadap sumber-sumber yang diperoleh. Setelah melalui tahapan kritik, proses selanjutnya adalah interpretasi dan penulisan sejarah atau historiografi dari berbagai sumber

yang ada. Tahapan historiografi merupakan langkah terakhir dalam proses penelitian ini.

Bab IV Mochtar Lubis: Pandangan Terhadap Kebijakan Politik di Indonesia tahun 1968-1974 dalam Surat Kabar *Indonesia Raya*. Pada bagian ini menjelaskan mengenai seluruh isi penelitian yang merupakan pertanyaan rumusan masalah yang telah disetujui oleh dosen pembimbing. Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam bab ini maka peneliti membagi bab ini kedalam beberapa sub-bab judul. Pertama, membahas mengenai keadaan politik di Indonesia pada tahun 1968-1974. Kedua, mengenai pemikiran Mochtar Lubis terhadap orientasi kebijakan politik dalam negeri Indonesia pada tahun 1968-1974. Ketiga, mengenai pemikiran Mochtar Lubis terhadap orientasi kebijakan politik luar negeri Indonesia pada tahun 1968-1974.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, bagian ini merupakan kesimpulan dan jawaban secara umum dari peneliti yang dapat diperoleh berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pandangan Mochtar Lubis dalam Surat Kabar Indonesia terhadap Kebijakan Politik di Indonesia Tahun 1968-1974 beserta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.